

### **Analisis Kerja Sama Budaya dalam Program *Sister City* Yogyakarta-Kyoto Tahun 2016-2021**

#### ***The Analysis of Cultural Cooperation in the Yogyakarta-Kyoto Sister City Program in 2016-2021***

**Muhammad Reza Rizaldi<sup>1</sup>, Vivit Widi Haryati<sup>2\*</sup>, Caesar Adrea Adi Wibowo<sup>3</sup>,  
Paquita Petrina Febriandi<sup>4</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
2210412143@mahasiswa.upnvj.ac.id\*

Diterima 22 Agustus 2024 | Direvisi 18 September 2024 | Diterbitkan 30 September 2024

#### **ABSTRACT**

*The close relationship between the Special Region of Yogyakarta and Kyoto Prefecture since 1985 has led the two regions to commit to paradiplomacy cooperation through the concept of sister cities. One of the areas highlighted in this research is the cultural field, where the two regions synergize to develop culture through paradiplomacy. Therefore, this research is present to identify factors that influence the success of cooperation and evaluate technical and non-technical barriers that affect the implementation of cooperation. This research uses a descriptive-analytical approach to analyze cultural cooperation between Yogyakarta and Kyoto in the field of culture as a whole. In addition, this article also uses the concept of actorness and the concept of paradiplomacy written by Aldecoa and Keating in 2013. This article found that the Sister City Cooperation between Yogyakarta and Kyoto has successfully promoted cultural exchange. However, there are still evaluations where the two regions need to improve coordination, especially in efforts to increase the capacity of the actors to achieve effective cooperation, lack of foreign language skills, and transparency in the implementation of paradiplomacy.*

**Keywords:** *Evaluation, Kyoto, Paradiplomacy, Sister City, Yogyakarta*

#### **ABSTRAK**

Memiliki kedekatan hubungan yang baik antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985 mendorong kedua daerah berkomitmen untuk melakukan kerja sama paradiplomasi melalui konsep *sister city*. Salah satu bidang yang disorot dalam penelitian ini adalah bidang budaya, di mana kedua daerah saling bersinergi untuk mengembangkan kebudayaan melalui paradiplomasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama serta mengevaluasi hambatan teknis dan non-teknis yang mempengaruhi implementasi kerja sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik untuk menganalisis kerja sama budaya antara Yogyakarta dan Kyoto dalam bidang budaya secara keseluruhan. Selain itu, artikel ini menggunakan konsep keaktoran (*actorness*) dan konsep

paradiplomasi yang ditulis oleh Aldecoa dan Keating di tahun 2013. Artikel ini menemukan bahwa Kerja sama *sister city* antara Yogyakarta dan Kyoto telah berhasil mempromosikan pertukaran budaya. Namun, masih terdapat evaluasi di mana kedua daerah perlu meningkatkan kapasitas para aktor yang terlibat guna mencapai keefektifan kerja sama, kurangnya kemampuan bahasa asing, dan transparansi dalam pelaksanaan paradiplomasi.

**Kata kunci:** *Evaluasi, Kyoto, Paradiplomasi, Sister City, Yogyakarta*

## PENDAHULUAN

Di dalam dunia Hubungan Internasional diplomasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana diplomasi sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah pelaksanaan hubungan antara negara berdaulat melalui para pejabat baik di dalam ataupun di luar negeri (Berridge and James, 2003). Dalam perkembangannya diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat yang mewakili pemerintah pusat saja tetapi saat ini juga dapat dilakukan oleh para pejabat yang mewakili pemerintah daerahnya guna mencapai kepentingan daerahnya. Salah satu pendorong hal ini terjadi adalah dengan hadirnya *City Diplomacy* yang merupakan cikal bakal dari istilah paradiplomasi yang dimana istilah ini mulai dikenal setelah adanya gerakan masif di beberapa kota di Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa hubungan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri telah diakui secara resmi (Surwandono dkk, 2021).

Paradiplomasi biasa disebut juga dengan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah lokal, seperti kabupaten, kota, bahkan provinsi yang di mana ini merupakan fenomena praktik tata kelola yang relatif baru di Asia (Mukti & Fathun, 2021). Di Indonesia sendiri kerja sama antara pemerintah daerah untuk melangsungkan hubungan kerja sama internasional terus mengalami perkembangan secara signifikan. Dalam hal kerja sama internasional di Indonesia sendiri menurut laporan Surwandono dkk. (2021), menyebutkan bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah dengan kerja sama internasional paling banyak di Indonesia, baik dalam kerja sama *Sister City* ataupun *Sister Province*. Salah satu wilayah yang paling aktif adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercatat secara aktif telah melakukan kerja sama dengan beberapa kota di dunia. Dalam melakukan kerja sama internasional ini khusus Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam UU No.13/2012 (Surwandono dan Maksum, 2020).

Salah satu kerja sama yang paling menarik untuk dibahas adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan Kyoto dimana kerja sama antar kedua daerah ini telah berlangsung sejak 1985 hingga saat ini. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang unik karena adanya pengaruh hubungan pribadi antara dua pemimpin yang terlibat pada masa itu. Menurut Alfarisi (2021), Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hayashida sudah berhubungan dekat sejak perang dunia II. Pada saat itu Yukio Hayashida merupakan tentara perang Jepang yang sudah mengenal seluk-beluk Yogyakarta. Dengan pemahaman Yukio Hayashida terhadap Yogyakarta, Yukio melihat adanya potensi yang besar di Yogyakarta sehingga dapat dimanfaatkan melalui kerja sama yang dapat menguntungkan pihak Jepang dan Indonesia.

Selain itu dalam membangun kerja sama ini, kedua daerah ini ternyata memiliki beberapa kesamaan baik dalam kesamaan historis, budaya, dan pendidikan. Secara historis kedua daerah ini sama-sama pernah menjadi ibu kota negaranya masing-masing yang membuat keduanya dipenuhi nilai perjuangan dan historis. Selain itu, Yogyakarta dan Kyoto juga sama-sama didapuk menjadi kota dengan pusat budaya dan pusat pendidikan di negaranya masing-masing. Dengan adanya kesamaan ini perlu adanya kerja sama untuk saling meningkatkan pelestarian nilai historis, kebudayaan, dan peningkatan kualitas pendidikan kedua negara.

Menurut Alfarisi (2021), kerja sama yang dilakukan Yogyakarta dan Kyoto telah diimplementasikan dalam banyak kegiatan yang produktif selama 3 dekade terakhir. Kyoto dianggap menjadi sahabat dekat Yogyakarta yang siap memberikan bantuan di saat Yogyakarta mengalami bencana guna mempercepat pemulihan kondisi Yogyakarta pasca bencana. Sementara Yogyakarta dianggap menjadi *partner* yang strategis karena tanpa adanya Yogyakarta, Kyoto kehilangan sebuah tempat untuk melakukan pertukaran budaya dan mempelajari hal baru. Namun, dalam kerja sama yang sudah berjalan selama 3 dekade tersebut, tetap terdapat sebuah catatan dalam pelaksanaannya. Jika kita menarik lebih spesifik pada periode 2016-2021 terdapat beberapa hal yang menjadi catatan pada pelaksanaan kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto karena beberapa hambatan baik secara teknis atau non-teknis yang dilaporkan telah menghambat jalannya pengimplementasian paradiplomasi kedua daerah tersebut.

Setelah melihat penjelasan di atas penelitian ini dirasa cukup penting dilaksanakan mengingat Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang paling produktif dalam menjalankan paradiplomasi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Jika penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengevaluasi kerja sama Yogyakarta-Kyoto secara garis besar tanpa berfokus pada satu bidang tertentu maka penelitian ini hadir untuk memberikan evaluasi secara dalam mengenai kerja sama di salah satu bidang khusus, yaitu bidang budaya antara Yogyakarta dan Kyoto. Di mana pada periode 2016-2021 kerja sama budaya begitu massif dengan program-program yang menarik namun masih terdapat beberapa catatan penting pada sinkronisasi isi MoU dan pelaksanaannya serta adanya situasi Covid-19 yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kerja sama secara signifikan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Konsep Keaktor (*Actorness*)**

Konsep *actorness* dapat memperkuat pemahaman kita terhadap dinamika hubungan internasional, khususnya dalam kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto pada periode 2016-2021. Sjöstedt (1977), mendefinisikan *actorness* sebagai kapasitas untuk berperilaku aktif dan sengaja dalam hubungannya dengan aktor lain dalam sistem internasional. Ini menekankan bahwa *actorness* adalah kualitas yang dinamis dan dapat diukur. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep *actorness* dapat membantu kita dalam memahami bagaimana berbagai aktor yang terlibat dapat memberikan pengaruhnya dalam suatu sistem sosial lewat kemampuan dan motivasi yang dimiliki.

Namun, dalam konsep ini juga terdapat dimensi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu mengenai dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi. Dalam dimensi internal sendiri terdapat 4 poin penting yang mempengaruhi, yaitu otoritas (kompetensi hukum yang dimiliki para aktor), otonomi (sumber daya dan kemampuan aktor untuk bertindak), kredibilitas dan kepercayaan (kapasitas untuk mencapai sebuah tujuan sekaligus menjadi pihak yang mampu diandalkan dan dipercaya). Selain itu, dalam dimensi eksternal terdapat 3 poin penting seperti pengakuan (diakuinya sebagai aktor yang sah oleh aktor lain dalam sistem internasional), daya tarik (kemampuan bekerja sama), dan peluang (perkembangan dan konstelasi di arena internasional) (Trigger, 2019).

Dalam konteks kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto, konsep ini akan mengarahkan bagaimana peran aktor-aktor subnasional yang terlibat akan sangat mempengaruhi arah jalannya kerja sama ini dan memungkinkan penilaian kerja sama dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan tujuan dari entitas regional maupun internasional. Tidak hanya itu melihat tindakan para aktor pada kerja sama ini, konsep ini hadir untuk memberikan pemahaman terkait kompleksitas yang ada berdasarkan bagaimana para aktor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi lewat cara mereka masing-masing. Maka dari itu, kerja sama ini dapat dianggap sebagai poin penting dari konsep *actorness* dalam melihat keefektifan paradiplomasi yang berjalan, hal ini membantu dalam menunjukkan bagaimana pentingnya perilaku dan tindakan para aktor mempengaruhi evaluasi dan hasil kerja sama yang terjalin.

### **Konsep Paradiplomasi**

Paradiplomasi merujuk pada perluasan wilayah terkait keterlibatan dalam urusan internasional, yang menandakan pergeseran dari peran tunggal negara dalam diplomasi. Di dalamnya, entitas-entitas seperti pemerintah daerah, perusahaan, gerakan sosial, dan organisasi transnasional dapat berinteraksi secara bersamaan. Kondisi global yang kompleks, terfragmentasi, dan tidak terstruktur memberikan konteks baru bagi diplomasi internasional (Aldecoa & Keating, 2013).

Dalam tulisan Keating (2000), menyebutkan dalam berjalannya kegiatan paradiplomasi juga terdapat motif yang mendasari terjadinya aktivitas paradiplomasi antara pemerintah daerah. Salah satu motif tersebut berupa motif budaya dengan pencarian dukungan linguistik maupun budaya lingkungan internasional. Keating menjelaskan bahwa kebudayaan daerah juga seringkali memiliki kepentingan yang sama melewati lintas batas negara. Dalam mencapai kepentingan tersebut dalam paradiplomasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor strategi. Faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki dalam melakukan hubungan eksternal dari kegiatan paradiplomasi (Aldecoa, 2013).

Dalam konteks kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto pada periode 2016-2021, konsep paradiplomasi dapat memperkuat pemahaman kita terhadap bagaimana usaha aktor-subnasional dalam mencapai tujuan kerja sama ini. Kerja sama ini telah melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari tingkat nasional, tetapi juga dari tingkat subnasional,

seperti Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas wilayah tidak lagi terbatas pada wilayah negara, melainkan juga melibatkan aktor-aktor subnasional lainnya.

Selain itu, paradiplomasi juga dapat membuka adanya suatu kerja sama yang lebih luas, mampu menyediakan berbagai motif kepentingan dan tujuan dari berbagai entitas di tingkat regional dan internasional. Dengan demikian, kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto dapat dipandang sebagai contoh dari bagaimana paradiplomasi dapat menjadi salah satu fenomena penting dalam dinamika hubungan internasional selain pihak negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengevaluasi kerja sama budaya antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kyoto dari tahun 2016 hingga 2021. Menurut Sugiyono (2013), deskriptif-analitik adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang terkumpul, tanpa melakukan analisis yang menghasilkan kesimpulan umum. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk secara teliti menggambarkan berbagai kegiatan kerja sama yang telah terjadi di bidang budaya antara kedua daerah, sementara pendekatan analitik memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin menghambat kemajuan kerja sama tersebut. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kualitatif kemudian akan dilakukan untuk menguraikan pola, tren, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kerja sama budaya antara DIY dan Kyoto selama periode penelitian.

Selanjutnya, penelitian akan memaparkan dengan rinci aktivitas-aktivitas kerja sama budaya yang telah dilakukan antara kedua daerah, seperti program pertukaran seni, kolaborasi kebudayaan, dan proyek-proyek budaya lainnya. Analisis mendalam juga akan difokuskan pada pengidentifikasian hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi kemajuan kerja sama budaya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kerja sama di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerja sama budaya yang lebih efektif dan berkelanjutan antara DIY dan Kyoto, serta menjadi landasan bagi upaya-upaya perbaikan di masa yang akan datang.

## PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menjalin kerja sama dengan Prefektur Kyoto sejak tanggal 16 Juli 1985. Kesepakatan kerja sama ini mencakup beberapa bidang, antara lain seni dan budaya, pendidikan dan teknologi, pariwisata, serta industri. Kerja sama yang dijalankan tersebut dikategorikan sebagai kerja sama *sister city* yang merupakan bentuk pengimplementasian dari konsep paradiplomasi. Di mana aktivitas kedua daerah tersebut juga sejalan dengan tujuan paradiplomasi dimana aktivitas tersebut merupakan aktivitas hubungan internasional yang dijalankan oleh aktor subnasional untuk mempromosikan kepentingan budaya, ekonomi, politik, dan dimensi lainnya (Cornago, 1999).

Awal terjalinnya kerja sama ini dapat ditelusuri dari hubungan personal antara para pemimpin DIY dan Kyoto saat itu, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Gubernur DIY pada masa itu, dan Yukio Hayashida, Gubernur Kyoto (Mukti, 2013). Selain itu, kerja sama ini tidak hanya didasari oleh kedekatan personal antara kedua pemimpin tersebut, tetapi juga oleh kesamaan karakteristik kedua daerah tersebut, seperti kaya akan warisan budaya, menjadi destinasi pariwisata, dan pusat pendidikan. Keduanya juga pernah menjadi ibu kota negara masing-masing, dan memiliki sejarah perjuangan yang kaya. Kesamaan ini memberikan kekuatan pada hubungan eksternal paradiplomasi kedua daerah yang mendorong adanya motif budaya sehingga pemerintah daerah mau terlibat untuk membentuk komunitas bagi daerahnya (Aldecoa, 2013).

Agar kerja sama antara D.I Yogyakarta dan Kyoto dapat diatur dengan baik, keduanya menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU). Setiap lima tahun, mereka memperpanjang kerja sama dengan menandatangani kembali MoU yang telah disepakati sebelumnya. MoU tersebut mencakup ketentuan-ketentuan untuk kerja sama antara kedua provinsi, yang disebut sebagai *sister city*. Berikut adalah MoU yang telah disepakati dalam kerja sama *sister city*:

1. Pada tanggal 16 Juli 1985, D.I Yogyakarta dan Kyoto menandatangani MoU yang disebut "*Agreement for the Establishment on Friendly Relations*". MoU ini berisi persetujuan dari kedua belah pihak dalam enam pasal. Kesepakatan ini membahas empat bidang kerja sama, yaitu seni dan budaya, pendidikan dan ilmu teknologi, pariwisata, dan industri.
2. Pada tahun 2010, D.I Yogyakarta dan Kyoto melakukan reafirmasi MoU kerjasama *sister city* yang ditandatangani pada 20 Oktober 2010. MoU ini

dikenal sebagai “*Reaffirmation of the Friendly Relations Agreement*” antara Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dan Pemerintah Prefektur Kyoto. Penandatanganan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur D.I Yogyakarta, dan Keiji Yamada, Gubernur Kyoto. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja sama antara kedua pihak dengan mempertahankan fokus pada empat bidang kerja sama yang telah disepakati sejak MoU 16 Juli 1985, yaitu seni dan budaya, pendidikan dan ilmu teknologi, pariwisata, dan industri.

Berdasarkan reafirmasi MoU tersebut, pariwisata dan kebudayaan merupakan agenda prioritas bagi kedua daerah. Sejak tahun 2005, telah diadakan berbagai pertemuan untuk mendorong kerja sama di sektor ini. Telah tercapai kemajuan dalam bidang pariwisata, seperti pembuatan *leaflet* bersama dalam dua bahasa (Indonesia dan Jepang) dan kerja sama dengan agen perjalanan. Di bidang kebudayaan, setiap pihak aktif dalam festival budaya yang diselenggarakan baik di Kyoto maupun D.I Yogyakarta.

3. Pada tanggal 27 Agustus 2015, dilakukan *Reaffirmation of the Friendly Relations Agreement* antara Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dan Pemerintah Kyoto, menjadi dokumen reafirmasi kerja sama antara D.I Yogyakarta dan Kyoto. Ini merupakan kedua kalinya reafirmasi ini dilakukan, di mana Jepang (Kyoto) bersama-sama dengan D.I Yogyakarta untuk menghormati semangat perjanjian kerja sama persahabatan antara keduanya yang telah ditandatangani pada 16 Juli 1985.

Melalui reafirmasi pada tahun 2015 ini, diharapkan kerja sama antara D.I Yogyakarta dan Kyoto akan menjadi lebih efektif dengan memfasilitasi terjalinnya hubungan antarmasyarakat kedua daerah serta mendorong instansi terkait di masing-masing daerah untuk aktif dalam merealisasikan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati. Fokus kerja sama ini tetap pada empat bidang utama, yaitu seni dan budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan industri.

Berdasarkan tiga MoU di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang budaya merupakan salah satu fokus utama dari kerja sama *Sister City* ini. Sejak ditandatangani pada tahun 1985, DIY-Kyoto telah melaksanakan banyak program di bidang ini. Seperti *fashion show* yang diadakan setelah produksi kimono batik dilakukan, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mempersembahkan sebuah kolaborasi. Acara tersebut digelar di KBRI Indonesia untuk



Jepang dan di Yogyakarta, sebagai bentuk peringatan akan persahabatan antara DIY dengan Kyoto. Selain itu, *fashion show* juga diadakan di Nishijin Textile Center. Meskipun kolaborasi batik kimono telah ada dan dijual di Kyoto sejak tahun 2004, namun belum mendapat perhatian serupa di Indonesia karena belum diresmikan sebagai program kerja sama *sister city*. Sehingga, produksi kimono batik hanya terjadi di Kyoto dan menjadi barang yang langka di Indonesia.

Program selanjutnya yaitu Lomba Lukis DIY – Kyoto yang merupakan acara tahunan yang secara rutin diadakan oleh Dinas Kebudayaan DIY, serta oleh Dinas Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota di DIY. Proses pelaksanaan lomba lukis ini bersifat bertahap, dimulai dari tahap penyelenggaraan di tingkat Kabupaten/Kota terlebih dahulu, di mana peserta yang lolos seleksi akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu babak kompetisi di tingkat DIY (Disbud Bantul, 2023). Sebanyak 30 karya terbaik hasil dari lomba lukis DIY-Kyoto tingkat provinsi DIY kemudian akan ditampilkan dalam pameran DIY-Kyoto.

Kerja sama *sister city* antara DIY dan Kyoto telah membawa dampak yang signifikan dalam bidang budaya, menjadi landasan kuat bagi pemeliharaan nilai-nilai sejarah dan perjuangan kedua negara. Berbagai program seperti *fashion show*, Jogja Japan Week, dan Lomba Lukis DIY-Kyoto menjadi wujud konkret dari kerja sama ini, memperkaya pertukaran budaya antara kedua daerah. Meskipun mengalami penundaan dalam pelaksanaannya, Jogja Japan Week tetap menjadi acara yang dinanti-nantikan, sementara Lomba Lukis DIY-Kyoto menjadi ajang tahunan yang memperlihatkan bakat seni lokal. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik pernyataan bahwa melalui kerja sama ini hubungan antara Yogyakarta dan Kyoto berhasil dikukuhkan serta menjadi inspirasi bagi kolaborasi budaya di masa depan. Tidak dipungkiri hal tersebut tentunya dapat terjadi karena adanya konsep paradiplomasi yang hadir sebagai entitas penting dalam menjalin hubungan kerja sama antar entitas subnasional (Lextyorini dkk, 2024).

### **Strategi Kerja Sama**

Upaya-upaya dalam sektor budaya menjadi salah satu pilar penting dalam kerja sama paradiplomasi antara Yogyakarta dan Kyoto selama periode 2016-2021. Melalui berbagai inisiatif kolaboratif, kedua negara telah mengambil langkah untuk memperkuat hubungan budaya mereka, mempromosikan pertukaran seni, warisan budaya, dan kearifan lokal

yang khas dari masing-masing wilayah. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa perjalanan kerja sama ini juga merujuk pada insiatif berupa beberapa program seperti adanya *fashion show*, Jogja Japan Week, hingga lomba melukis bagi para siswa dan siswi di Indonesia.

Guna melancarkan kerja sama dalam bidang budaya secara maksimal, maka kami menyoroti bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dalam kelangsungan kerja sama ini. Hal ini karena dalam tulisan Aldecoa (2013), menyebutkan bahwasanya paradiplomasi dalam melakukan hubungan eksternalnya harus memiliki beberapa faktor penting salah satunya adalah ‘strategi’. Faktor tersebut digunakan guna mencapai fungsi paradiplomasi sebagai upaya memberikan layanan bagi warganya sekaligus mempromosikan desentralisasi (Fathun, 2022).

Menurut Alfarisi, H. (2021) di tahun 2016, merupakan masa penting dan awal baru bagi pengembangan bidang kebudayaan di Yogyakarta. Yogyakarta memiliki kesempatan untuk memamerkan 30 hasil karya dari lomba yang diikuti oleh siswa dan siswi saat itu kemudian akan dipamerkan di pameran seni di Kyoto. Indonesia memilih Yogyakarta pada saat itu sehingga hal ini dapat membuka peluang lebih besar kepada Yogyakarta dan Kyoto untuk mengembangkan kerja samanya terutama pada sektor budaya.

Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah Yogyakarta-Kyoto terus menyadari pentingnya penguatan sektor kebudayaan pada kerja sama ini, sebagaimana hal ini diketahui saat adanya kunjungan dari Pemerintah Kyoto saat itu, yaitu Shuichi Yamauchi (Wakil Gubernur Kyoto) yang mana pada kunjungan tersebut kedua pihak saling berdiskusi mengenai penguatan kerja sama yang akan dilakukan selanjutnya termasuk pada sektor budaya. Dikatakan bahwa pihak Pemerintah Kyoto berharap untuk mendapatkan seni dan kerajinan dari Yogyakarta yang bisa dikirim ke Kyoto untuk perayaan 35 tahun peringatan kerja sama keduanya pada 2020 lalu, Pemerintah Kyoto juga tertarik untuk menjalin kerja sama lebih lanjut dengan para pengrajin yang ada di Indonesia khususnya Yogyakarta. Walaupun hal ini sempat tertunda karena adanya Covid-19, namun setidaknya ini telah membuka mata bagi pemerintah tentang bagaimana peluang yang ditawarkan khususnya terhadap pengrajin dan pengusaha yang ada di Yogyakarta (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).

Menilik bagaimana strategi Yogyakarta-Kyoto dalam mengembangkan budayanya, sektor investasi menjadi ladang kesempatan bagi kedua wilayah. Diketahui dari Gunawan T (2024) bahwa investasi juga menyentuh pengaruhnya terhadap perkembangan kebudayaan lewat sektor pariwisata. Investasi yang menonjol dari hal ini adalah lewat sektor MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan dari perusahaan PT. Haruna Wisata Indonesia, sebuah perusahaan asal Kyoto, Jepang, yang telah menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tahun 2001 dan berbasis di Kabupaten Sleman, PT. Haruna Wisata berkembang pesat sehingga perusahaan ini menjadi mitra terpercaya bagi warga Yogyakarta hingga Indonesia yang ingin menjelajahi budaya ke Jepang yang tentunya dengan fokus utama yaitu pada Kota Kyoto. Investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mengindikasikan perkembangan budaya di Yogyakarta. Semakin banyaknya minat masyarakat untuk memahami dan mengeksplorasi budaya Jepang mencerminkan fenomena yang menarik. Melalui investasi seperti ini, hubungan antarbudaya Yogyakarta dan Kyoto semakin terjalin erat, menciptakan kesempatan untuk pertukaran pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam di antara kedua negara.

Pada masa Covid 19, yaitu periode waktu 2020-2021, menjadi pukulan besar bagi kedua pihak terkait kerja sama yang dibangun. Namun, berbagai hal diupayakan guna membantu kerja sama dalam bidang kebudayaan dapat terus terlaksana. Dikutip dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (2020), walaupun Covid-19 melanda, Pemerintah Yogyakarta tetap melangsungkan kegiatan lomba melukis yang mekanisme lomba tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pengambilan, pengumpulan hingga penjurian. Lomba ini digelar bagi para siswa dan siswi dari SD hingga SMA, Beruntungnya masih banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti lomba ini dengan tercatat sekitar 176 siswa/siswi bahkan lebih banyak dibanding dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi serta strategi paradiplomasi budaya tetap diusahakan terlaksana oleh pemerintah walau memang ada banyaknya hambatan di masa Covid-19. Saat itu sama halnya di tahun 2021 walau lomba lukis belum bisa dilaksanakan secara luring, namun Pemerintah Yogyakarta tetap semangat dalam melaksanakan program tahunan ini agar tetap terlaksana. Begitu juga dengan pameran yang dilangsungkan, walaupun Pemerintah Kyoto saat itu tidak memberikan karyanya karena Covid-19 melanda namun Pemerintah Yogyakarta tetap berusaha untuk tetap mengirimkan 30 hasil karya

anak bangsa ke Kyoto dan Pemerintah Yogyakarta juga tetap menampilkan lukisan-lukisan hasil lomba tersebut pada pameran yang telah berlangsung di Bentara Budaya Yogyakarta (Wardhani, 2021).

### **Aktor dan Koneksi Aktor**

Dalam konteks bahasan artikel ini, maka terdapat dua aktor utama dalam kerja sama *sister city* antara D.I Yogyakarta dan Prefektur Kyoto, yaitu Pemerintahan D.I Yogyakarta di bawah Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Pemerintah Prefektur Kyoto Daisaku Kadokawa, serta Duta Besar Jepang (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Para aktor terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama guna meningkatkan hubungan mutualisme, untuk mencapai hal ini kedua pemerintah telah melakukan berbagai kerja sama dalam berbagai bidang (Alfarisi, 2021).

Dalam pelaksanaan hubungan kerja sama *sister city* ini, realisasi program didominasi dilakukan di dalam negeri. Beberapa contohnya seperti kunjungan Wakil Walikota Prefektur Kyoto yang pernah mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka memperingati kerja sama *sister city* kedua kota dan kerja sama dalam bidang pendidikan (Universitas Gadjah Mada, 2018). Kerja sama yang dimaksud merupakan program beasiswa dan studi di luar negeri mahasiswa-mahasiswa UGM ke Kyoto University, sehingga dapat dikatakan bahwa UGM sebagai instansi pendidikan DIY merupakan aktor yang dominan dalam kerja sama bidang pendidikan.

Organisasi yang bergerak dalam bidang kebudayaan juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun pertukaran budaya antara D.I. Yogyakarta dengan Kyoto, diantaranya terdapat The League of Historical Cities (LHC) dan Japan Foundation (JF). LHC sendiri merupakan organisasi internasional yang beranggotakan kota-kota historis di berbagai negara yang berfokus pada preservasi budaya yang berpusat di Kyoto (The League of Historical Cities, n.d). Untuk JF sendiri, mereka telah melakukan berbagai program untuk membina kerja sama budaya, seperti program Nihongo Partners yang merupakan bentuk kolaborasi antara JF dengan Kemendikbud dalam rangka edukasi bahasa Jepang di berbagai daerah di Indonesia salah satunya Yogyakarta (Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2019). Kendati demikian, pengaruh Keraton Yogyakarta yang begitu kuat ke masyarakatnya

menjadi sebuah hambatan bagi JF untuk dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, butuh waktu dan upaya lebih agar mereka untuk pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat dibantu dengan adanya kerja sama *sister city* ini.

### **Evaluasi Kerja Sama Yogyakarta-Kyoto**

Di era globalisasi penerapan desentralisasi mampu memberikan peran yang besar kepada daerah untuk mengatur serta mengembangkan dirinya sendiri. Dalam tulisan Christia & Ispriyarso (2019), desentralisasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna mengatur daerahnya. Menurut Gunawan (2024), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 hadir untuk mengatur pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama antardaerah, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dalam fokus kerja sama internasional, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang tidak ingin melewatkan kesempatan besar dalam menjalankan kerja sama internasional guna meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Kerja sama yang dipilih Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerja sama internasional berupa kerja sama *sister city* atau kota kembar bersama Prefektur Kyoto. Menurut Gunawan (2024), dalam pengimplementasiannya kerja sama ini selalu menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari kedua daerah melalui kegiatan yang konsisten tiap tahunnya. Sebagai contoh nyata Yogyakarta secara rutin mengadakan festival tari dan festival tradisional untuk menjaga daya tarik sekaligus menjaga kerja sama antara kedua wilayah tersebut. Selain itu, pada tahun 2016 DIY-Kyoto juga mengadakan pameran lukisan dengan tema “Jogja-Omahku”. Di tahun 2016 dan 2017 DIY-Kyoto mengadakan kompetisi melukis yang kemudian akan dipamerkan bersama karya lukisan anak muda dari Jepang (Tristofa dan Tham, 2022).

Meskipun kerja sama *sister city* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto dikatakan sukses, namun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dievaluasi guna memperbaiki penerapan kerja sama antar kedua daerah di masa yang akan datang. Evaluasi sendiri penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalin sebuah kerja sama dalam sebuah bingkai *sister city* guna pelaksanaannya jauh lebih baik kedepannya (Safitri dkk, 2023). Dalam tulisan Issundari, Yani, Sumadinata, dan Heryadi (2021), menyebutkan langkah paradiplomasi Yogyakarta harus sejalan dengan peningkatan kapabilitas para pelaksananya.

Hal ini sejalan dengan konsep ‘*actorness*’ dalam tulisan Sjöstedt (1977) dan Kuznetsov (2015), di mana keefektifan kegiatan paradiplomasi dapat terjadi jika para aktor subnasional memiliki kapasitas yang baik untuk bertindak sebagai aktor independen dalam sistem internasional.

Pada pelaksanaannya, para aktor yang terlibat dari pihak Yogyakarta masih belum memiliki kapasitas yang baik guna mendorong berjalannya kerja sama ini. Hal tersebut karena pihak Dinas Kebudayaan DIY menunjukkan masih kurang adanya koordinasi antar-instansi pada para pelaksana paradiplomasi budaya di Yogyakarta. Selain itu, kemampuan bahasa asing dari para praktisi dalam pengimplementasian paradiplomasi masih cukup kurang. Di dalam BKPM sendiri tidak semua administrator mampu menggunakan bahasa Inggris, hal ini kemudian menghambat komunikasi dengan pihak internasional (Issundari dkk, 2021).

Selain permasalahan kemampuan komunikasi dari pihak Yogyakarta, Pemerintah Kyoto dalam membina hubungan kerja sama tersebut juga masih memiliki permasalahan seperti masih belum mampu membangun konsistensi dalam komunikasi. Salah satunya masalah tidak adanya *contact person* atau lembaga yang spesifik yang bertugas untuk menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Wicaksono, 2017). Hal tersebut tentunya menjadi catatan bagi kedua negara dalam membangun sebuah komunikasi yang baik mengingat dalam melakukan hubungan diplomasi komunikasi adalah suatu hal yang penting. Dalam tulisan Safri (2019), komunikasi yang dilakukan dalam berdiplomasi dapat menjembatani kedua pihak untuk saling menyatukan pandangan dengan saling memahami perbedaan tafsir.

Selain permasalahan komunikasi, kami menemukan permasalahan dalam pelaksanaan *event* Jogja-Japan Week yang menjadi bagian dari kerja sama ini. Jogja-Japan Week sendiri dihelat guna memperingati hubungan kerja sama sekaligus persahabatan antara Indonesia dan Jepang sekaligus mempererat hubungan antara Yogyakarta dan Kyoto sebagai *sister city* (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Pada kunjungan kerja sama Yogyakarta-Kyoto yang diadakan di Keraton Yogyakarta pada tahun 2019 terdapat pembahasan mengenai penguatan kerja sama *sister city* salah satunya membahas mengenai *event* “Jogja-Japan Week” yang diadakan setiap dua tahun sekali dalam rangka pertukaran budaya sekaligus persahabatan (Alfarisi, 2021).

Dalam pelaksanaannya Jogja-Japan Week tidak dilakukan secara berkala, pada periode 2016-2021 tidak terdapat *record* pelaksanaan Jogja-Japan Week, namun hanya sebatas pembahasan di tahun 2019. Selama kerja sama kedua daerah berlangsung Jogja-Japan Week berhasil diselenggarakan pada tahun 2010, 2012, 2015, dan terakhir di tahun 2023 dengan konsep kolaborasi seni, edukasi, *fashion*, kuliner, dan budaya tradisional serta modern Jepang (MNC Trijaya, 2023). Hal ini kemudian menjadi catatan bagi para pelaksana Jogja-Japan Week untuk melakukan konsistensi pelaksanaan kegiatan sehingga kerja sama kedua daerah dapat terus berjalan dengan baik dan terdapat keseriusan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam bidang budaya.

Kerja sama *sister city* Yogyakarta dan Kyoto juga masih terdapat kekurangan lainnya yang perlu diperbaiki yaitu permasalahan dalam proses *report* dari kedua belah pihak. Dari Pemerintah Yogyakarta sendiri terlihat masih kurang aktif dalam menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Yogyakarta dengan Kyoto terhadap masyarakat umum. Selain itu, pihak Kyoto hanya menampilkan informasi 2 kunjungan saja selama kerja sama *sister city* kedua negara berlangsung dan dari dua kunjungan yang dipublikasikan tersebut tidak ada yang mencangkup kerja sama bidang budaya. Pada laman resmi *website* Kyoto sendiri laporan kerja sama antar kedua kota tersebut juga masih terlihat minim.

Perlu digaris bawahi kemunculan aktivitas paradiplomasi juga menekankan pada asas transparansi serta keterbukaan yang dimana dalam membentuk sebuah lingkungan yang produktif sekaligus bersahabat diperlukan peran aktor-aktor internasional untuk memenuhi asas dasar transparansi serta keterbukaan (Alfarisi, 2021). Dengan tidak ditemukannya data “Laporan Akhir Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Pemerintahan DIY” di periode 2016-2021 menjadi kekurangan bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam melakukan transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam urusan paradiplomasi terhadap masyarakat umum.

Meninjau penjelasan di atas, dapat kita katakan bahwa masih banyaknya kekurangan yang ditemukan pada kerja sama *sister city* Yogyakarta-Kyoto dalam bidang budaya periode 2016-2021. Hal tersebut terjadi karena para aktor yang terlibat masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan aktivitas kerja sama tersebut. Kedua daerah dirasa harus kembali mengkaji kapasitasnya masing-masing karena dalam konsep ‘*actorness*’

peran aktor-aktor yang terlibat sangat mempengaruhi jalannya kerja sama. Dengan menaruh *concern* pada perbaikan ‘*actorness*’ maka akan membawa kepada efektivitas yang beragam (Brattberg & Rhinard, 2013).

## KESIMPULAN

Kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Prefektur Kyoto merupakan ilustrasi konkret dari konsep paradiplomasi, yang memungkinkan entitas subnasional untuk menjalin hubungan internasional guna memajukan kepentingan lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sejak dimulai pada tahun 1985, kerja sama ini meliputi berbagai bidang seperti seni dan budaya, pendidikan, pariwisata, dan industri, yang didasarkan pada hubungan personal antara pemimpin kedua daerah serta kesamaan karakteristik sejarah dan budaya. Evaluasi terhadap kerja sama budaya selama periode 2016-2021 menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan teknis dan non-teknis, termasuk pandemi Covid-19, program-program seperti lomba lukis, pameran seni, dan kolaborasi budaya lainnya tetap berhasil dilaksanakan dan memberikan manfaat signifikan bagi kedua pihak. Investasi di sektor pariwisata dan budaya, serta upaya melibatkan masyarakat dan organisasi lokal, mencerminkan komitmen kuat dari kedua daerah untuk memelihara dan mengembangkan hubungan yang telah terjalin.

Namun, evaluasi juga mengungkapkan beberapa kelemahan, seperti kurangnya koordinasi antar-instansi di Yogyakarta dan Kyoto, kurangnya inisiatif transparansi laporan antar-instansi, kurangnya koordinasi pelaksanaan *event* tahunan, serta kurangnya kemampuan bahasa asing dari para praktisi paradiplomasi yang masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kerja sama ini. Dalam konteks *actorness*, yang mencakup kapasitas, otoritas, legitimasi, dan pengakuan, DIY dan Kyoto menunjukkan masih kurangnya kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam arena paradiplomasi. Aktor-aktor utama dalam kerja sama ini, seperti Pemerintah DIY, Prefektur Kyoto, dan berbagai organisasi kebudayaan, memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan berbagai program. Guna mencapai keberhasilan kerja sama yang efektif, penting diadakannya kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan paradiplomasi



yang efektif, serta menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak sehingga kerja sama internasional di tingkat sub-nasional dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldecoa, M. K. (2013). *Paradiplomacy in Action*. Routledge.
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Routledge.
- Alfarisi, H. (2021). Analisis Kerja Sama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.623>
- Berridge, G.R., & James, A. (2003). *A Dictionary of Diplomacy*. Macmillan.
- Brattberg, E. & Rhinard, M. (2013). Actorness and Effectiveness in International Disaster Relief: The European Union and United States in Comparative Perspective. *International Relations*, 27(3). <https://doi.org/10.1177/0047117813497298>
- Christia, A. M. & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiscal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Cornago, N. (1999). Diplomacy and Paradiplomacy in the Redefinition of International Security: Dimensions of Conflict and Co-operation. *Regional & Federal Studies*, 9(1). <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13597569908421070>
- Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. (2020). *Lomba Lukis DIY-Kyoto Tingkat Kota Yogyakarta*. <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/lembaga-penggiat-seni-2020--lomba-lukis-diy-kyoto-tingkat-kota-yogyakarta>
- Disbud Bantul. (2023). *Lomba Lukis DIY - Kyoto 2023*. <https://disbud.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-bidang-adat-tradisi-lembaga-budaya-dan-seni-lomba-lukis-diy-kyoto-2023#:~:text=Lomba%20Lukis%20DIY%20%E2%80%93%20Kyoto%20adalah,kota%20se%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta>
- Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48595>

- Gunawan, T. (2024). Harmony in Leadership. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1277>
- Issundari, S., Yani, Y. M., Sumadinata, R. W. S., & Heryadi, R. D. (2021). From Local to Global: Positioning Identity of Yogyakarta, Indonesia through Cultural Paradiplomacy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0074>
- Keating, M. (2000). Paradiplomacy and Regional Networking. *Forum of Federations: An International Federalism*, 613(10).
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. (2019). *Program NIHONGO Partners Pedoman Pendaftaran bagi Sekolah*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/a5219e8d4bab700>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy*. Routledge.
- Lextyorini, D. W., Azzahra, F., Ramadhani, A. M., & Djuwairah, S. (2024). Analisis Praktik Paradiplomasi Wilayah Asia Timur: Kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Koperasi Ekonomi Melalui Sister City. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(9).
- MNC Trijaya. (2023). *Jogja Japan Week Hadir untuk Peringati Hubungan Kerjasama 65 Tahun Indonesia-Jepang*. <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/60956/jogja-japan-week-hadir-untuk-peringati-hubungan-kerjasama-65-tahun>.
- Mukti, A. T. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Mukti, A. T., Fathun, L. M., Muhammad, A., Sinambela, S. I., & Riyanto, S. (2021). Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2). <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8931>
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Pemda DIY Lanjutkan Kerjasama dengan Kyoto*. [https://Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,.go.id/berita/pemda-diy-lanjutkan-kerjasama-dengan-kyoto](https://Pemerintah%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta.go.id/berita/pemda-diy-lanjutkan-kerjasama-dengan-kyoto)
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Program Sister province Kyoto-DIY Kembali Diperkuat*. [https://Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,.go.id/berita/program-sister-province-kyoto-diy-kembali-diperkuat](https://Pemerintah%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta.go.id/berita/program-sister-province-kyoto-diy-kembali-diperkuat)
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Jogja Japan Week 2023, Perkuat Hubungan Bilateral Jepang dan DIY*. [https://Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.go.id/berita/jogja-japan-week-2023-perkuat-hubungan-bilateral-jepang-dan-diy](https://Pemerintah%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta.go.id/berita/jogja-japan-week-2023-perkuat-hubungan-bilateral-jepang-dan-diy)

- Safri, S. (2019). *Komunikasi sebagai Kunci Keberhasilan Diplomasi*.  
<https://www.kompasiana.com/salsabilasafitri0441/5db3f6d1d541df3a230d52e2/komunikasi-dan-diplomasi-apa-kaitannya>
- Safitri, N., Syafira, S. P., & Kurniawati, D. E. (2023). Analisa Faktor Penyebab Kegagalan Sister Cities di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1).  
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.2016>
- Sholahudin, U. (2019). Globalisasi: Antara Peluang dan Ancaman bagi Masyarakat Multikultural Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4(2).
- Sjöstedt, G. (1977). *The External Role of the European Community*. SaxonHouse.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.CV.
- Surwandono, S., & Maksum, A. (2020). The Architecture of Paradiplomacy Regime in Indonesia: A Content Analysis. *Jurnal Politik Internasional*, 22(1).  
<https://doi.org/10.7454/global.v22i1.443>
- Surwandono, S., Nugroho, A., & Yanuar, M. D. (2021). Evaluation on Indonesia's Local Government Website for Practicing Paradiplomacy. *Jurnal Global & Strategis*, 15(2).  
<https://doi.org/10.20473/jgs.15.2.2021.451-475>
- The League of Historical Cities. (n.d). *Outline of the League of Historical Cities*.  
<https://www.lhc-s.org/2024/brochure2024.pdf>
- Trigger, (2019). *Conceptualizing EU Actorness*. <https://trigger-project.eu/2019/12/03/conceptualizing-eu-actorness/>
- Tristofa, L., & Tham, A., (2022). The Implementation of Sister City Agreement on Tourism between the Special Region of Yogyakarta Indonesia and Kyoto Japan. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jpcn.v1i1.4>
- Universitas Gadjah Mada. (2018). *Wakil Gubernur Kyoto Kunjungi UGM*.  
<https://ugm.ac.id/id/berita/16899-wakil-gubernur-kyoto-kunjungi-ugm/>
- Wardhani, C. M. (2021). *Dinas Kebudayaan DIY Gelar Lomba Lukis dan Pameran DIY-Kyoto, 30 Karya Terbaik Dikirim ke Jepang*. *Tribunjogja.com*.  
<https://jogja.tribunnews.com/2021/10/28/dinas-kebudayaan-diy-gelar-lomba-lukis-dan-pameran-diy-kyoto-30-karya-terbaik-dikirim-ke-jepang>
- Wicaksono, A. (2017). *Kerja Sama Internasional Sister City Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Prefektur Kyoto*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21325>